

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu badan usaha dalam sistem perekonomian di Indonesia, koperasi di harapkan dapat berkembang secara sehat dan dinamis. Peranan koperasi sangat penting dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, karena tujuan koperasi adalah memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi anggota koperasi itu sendiri dan masyarakat luas.

Istilah koperasi sebenarnya berasal dari bahasa asing yaitu *Co-Operation*; dimana *Co* berarti bersama dan *Operation* berarti usaha. Secara harafiah koperasi dapat diartikan sebagai usaha bersama. Dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Adapun maksud dan tujuan pedoman umum akuntansi koperasi adalah untuk menyediakan pedoman yang standar tentang penyajian laporan keuangan koperasi, sehingga membantu mempercepat pengurus dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan koperasi pada rapat anggota tahunan, maupun untuk tujuan-tujuan lain.

Menurut PSAK No. 1 (2015:1), “Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”.

Laporan keuangan tersebut merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada pihak internal maupun eksternal. Pihak internal yang dimaksud terbagi

menjadi 3 yaitu: manajemen, pemegang saham atau investor, dan karyawan. Sedangkan pihak eksternal merupakan kreditor dan pemerintah.

SAK adalah standar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia terdiri atas 4 pilar yaitu Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum, SAK ETAP, SAK Syariah, dan Standar Akuntansi Pemerintah. SAK umum diperuntukkan bagi perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik. Sedangkan untuk usaha mikro kecil menengah digunakan SAK ETAP, SAK Syariah untuk lembaga atau badan usaha syariah dan SAP diperuntukkan bagi lembaga atau badan pemerintahan.

Pada awalnya standar akuntansi yang digunakan mengacu pada standar akuntansi yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 27 (PSAK 27) Akuntansi Perkoperasian. Akan tetapi, pedoman ini kemudian dicabut pada 8 April 2011 melalui Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) tentang Pencabutan PSAK 27. Alasan dari pencabutan tersebut karena dampak dari konvergensi ke standar akuntansi internasional (*International Financial Reporting Standard atau IFRS*) yang mengakibatkan perlunya pencabutan SAK untuk suatu industri tertentu, dikarenakan pengaturan akuntansi secara prinsip sudah ada dalam SAK yang mengacu ke IFRS.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, yang berperan dalam membangun dan mengembangkan koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, telah mengatur suatu pedoman akuntansi koperasi, yaitu:

1. PermenKopUKM No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil.
2. PermenKopUKM No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
3. PermenKopUKM No. 14/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembuatan Syariah oleh Koperasi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUMK/IX/2015, tentang “Pedoman Umum Akuntansi Koperasi”, maka setiap koperasi yang tidak memiliki akuntabilitas publik, dipersyaratkan laporan keuangannya mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah membuat pedoman akuntansi keuangan usaha simpan pinjam sebagai panduan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan usaha simpan pinjam. Penyusunan pedoman ini didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK Umum) dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang dimodifikasi sesuai dengan tujuan dan keunikan karakteristik transaksi usaha simpan pinjam oleh koperasi yang berbeda dari entitas komersial ataupun entitas publik lainnya. Prinsip yang mendasari perlakuan akuntansi atas transaksi usaha simpan pinjam pada pedoman ini bersifat konvensional.

PermenKopUKM No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 adalah peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia yang mengatur tentang pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi.

KPRI GKR Pasir Pengaraian berkedudukan di jalan Diponegoro Simpang Tugu Pasir Pengaraian Rambah Rokan Hulu, berdiri pada tahun 1970 dengan nama Badan Kesejahteraan Guru (BAKESRU) yang meliputi wilayah Tambusai, Kepenuhan, dan Rambah. Pada tahun 1982 BAKESRU diganti dengan nama KPRI GKR Pasir Pengaraian dengan badan hukum 1119/BH/XIII/1982. tetapi pada tanggal 11 Mei Tahun 1996 badan hukum koperasi dirubah dengan badan hukum 228/Bh/Pad/Kwk.4/51/VI/1996. Koperasi ini bergerak dalam bidang simpan pinjam dan waserda.

KPRI GKR Pasir Pengaraian diketuai oleh Bapak Paryono, S.Sos. S.Pd. Koperasi ini memiliki anggota sebanyak 594 orang, dan karyawan yang bekerja di kantor koperasi tersebut sebanyak 17 orang yang terdiri dari 4 orang Pembina kecamatan, 3 orang karyawan kantor, 5 orang karyawan swamitra, 3 orang manager/KA unit dan 2 orang petugas keuangan.

Berdasarkan uraian sebagaimana yang dijelaskan diatas maka penulis ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang penerapan Standar Akuntansi Keuangan pada penyusunan laporan keuangan KPRI GKR Pasir Pengaraian Untuk itu penulis mencoba mengungkapkan permasalahan ini dengan Judul : **“ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PADA LAPORAN KEUANGAN KPRI GKR PASIR PENGARAIAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: **“Apakah laporan keuangan pada KPRI GKR Pasir Pengaraian sudah sesuai dengan PermenKopUKM No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015?**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai yaitu mengetahui apakah laporan keuangan pada KPRI GKR Pasir Pengaraian sudah sesuai dengan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Bagi penulis dapat menambah wawasan mengenai penerapan standar akuntansi dalam menyusun laporan keuangan perkoperasian.

b. Bagi Pengusaha

Dapat membantu Koperasi dalam menyajikan laporan keuangan yang baik dan benar sesuai Standar Akuntansi Keuangan perkoperasian dan sebagai masukan dalam melaksanakan praktek akuntansi yang baik.

c. Bagi Akademis

Dapat menjadi referensi bagi calon peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian dengan judul yang sama.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian agar tidak terlalu memperluas permasalahan. Sehingga penelitian yang dilakukan tidak

menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu penulis akan membatasi penelitian ini pada:

1. Penelitian ini dilakukan di KPRI GKR Pasir Pengaraian.
2. Penelitian ini hanya terbatas pada Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pada Laporan Keuangan KPRI GKR Pasir Pengaraian.
3. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan keuangan KPRI GKR Pasir Pengaraian Tahun 2020.

1.6 Originalitas

Dalam Penelitian ini penulis mengambil gagasan atau ide dari Jurnal Eva Malina Simatupang yang berjudul Analisis Penerapan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan pada koperasi pegawai negeri SMPN 7 Pematang Siantar tahun 2018. Adapun yang membedakan dari penelitian ini dengan penelitian yang lain adalah tempat penelitian dan tahun penelitian.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan tentang penelitian yang dilakukan, maka disusunlah sistematika penulisan yang akan dibahas dalam setiap bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah, originalitas dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas mengenai deskripsi teori dan hasil penelitian yang relevan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Membahas tentang objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Merupakan hasil dan pembahasan yang membahas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran sesuai dengan hasil dan pembahasan dalam penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.

Akuntansi berasal dari kata asing *accounting* yang artinya bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ialah menghitung atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi digunakan di hampir seluruh kegiatan bisnis di seluruh dunia untuk mengambil keputusan sehingga disebut sebagai bahasa bisnis.

Secara umum Akuntansi ialah sistem informasi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memberi laporan yang berhubungan dengan keuangan kepada pihak yang membutuhkan serta memberikan informasi tentang kondisi perusahaan secara ekonomi.

Pengertian akuntansi menurut *American Institute Of Public Accounting* (AICPA) dalam buku karangan Rizal Effendi (2015:3) adalah sebagai berikut:

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam bentuk ukuran monometer, transaksi, dan kejadian - kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil - hasilnya.

Sedangkan pengertian akuntansi menurut Warren (2017:10) adalah akuntansi merupakan sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi entitas.

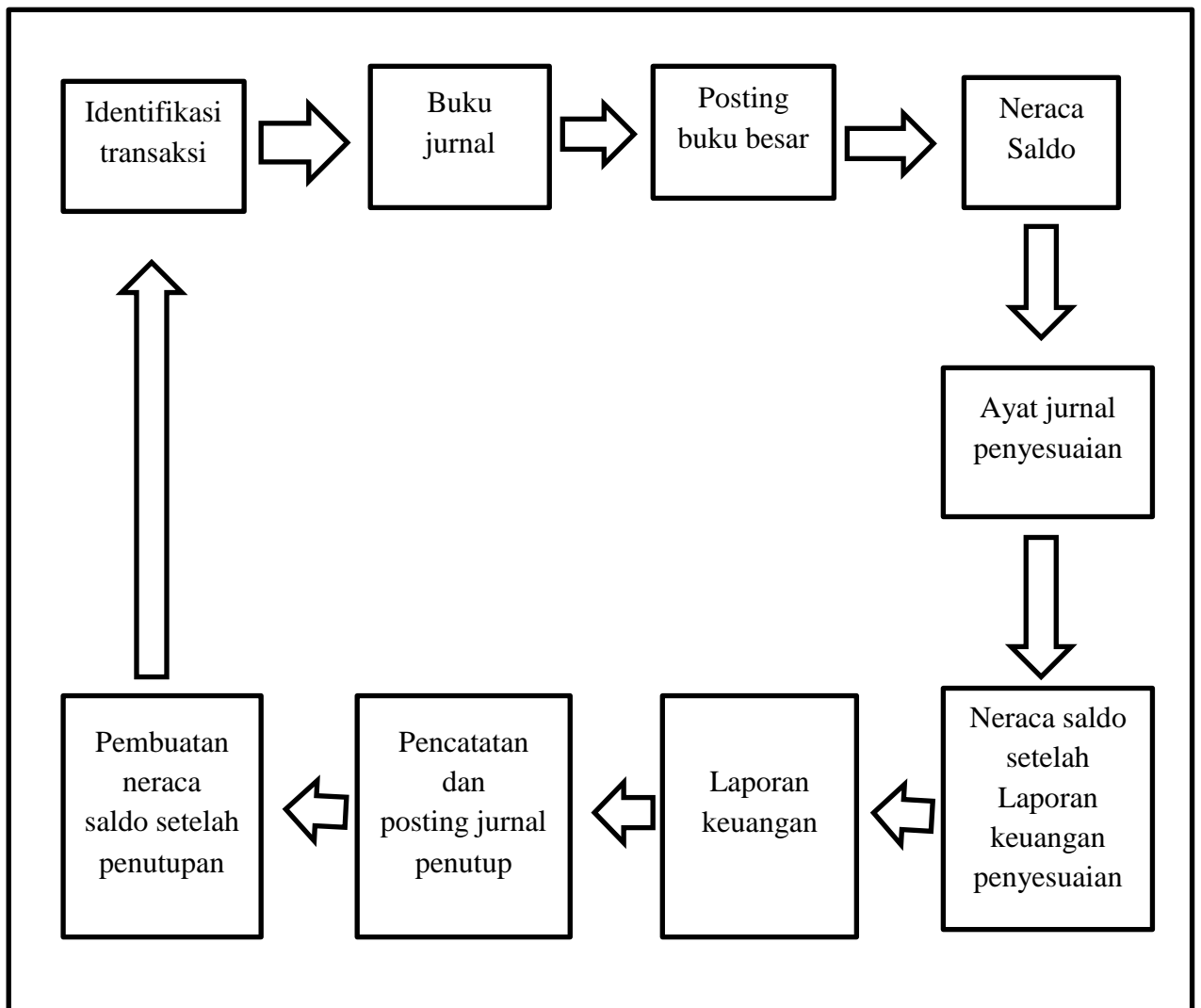
Dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu kegiatan penyusunan pencatatan dan proses perhitungan untuk bisa melaporkan atau memberikan informasi ekonomi bagi pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi.

2.1.2 Siklus Akuntansi

Menurut Bahri (2016) siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan yang dimulai dari terjadinya transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan sehingga siap untuk pencatatan berikutnya. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa siklus akuntansi merupakan tahap-tahap proses akuntansi dalam suatu sistem informasi akuntansi yang diperlukan untuk mengumpulkan dan mengolah data terkait dengan transaksi bisnis yang terjadi dalam perusahaan. Dikatakan sebagai siklus, karena setiap tahap proses akuntansi dilakukan secara berulang kali selama perusahaan beroperasi. Berikut merupakan tahapan siklus akuntansi:

Gambar 2.1

Siklus Akuntansi



Siklus akuntansi dimulai dengan identifikasi transaksi. Transaksi merupakan peristiwa mencatat semua kegiatan keuangan sehari-hari kedalam bukti-bukti transaksi dimana nilainya dapat dinyatakan dengan satuan moneter dan akan mengakibatkan perubahan pada posisi keuangan, contoh dari transaksi yaitu menerima pembayaran dari pelanggan, membayar biaya, melakukan penjualan,

melakukan pembelian dan transaksi lainnya. Bentuk bukti transaksi dapat berupa kwitansi, faktur penjualan, faktur pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas, nota penjualan atau pembelian, dan lain sebagainya yang kemudian dipilih menurut jenis transaksinya masing-masing. Berdasarkan dokumen pendukung tersebut kemudian dibuat jurnal yang diringkas pencatatannya sesuai dengan nama akun setiap jenis-jenis transaksi. Jurnal harus seimbang antara debit dan kredit. Oleh karena itu setiap perusahaan terlebih dahulu menyusun *Chart of Account* (COA) atau daftar kode akun sebelum menyusun jurnal.

Setelah melakukan penjurnalan, kemudian dipindahkan ke buku besar atau disebut dengan proses Posting. Buku besar merupakan kumpulan akun yang digunakan serta dimiliki oleh perusahaan, buku besar pada akhirnya akan menunjukkan jumlah saldo akhir yang kemudian dikumpulkan menjadi neraca saldo. Neraca saldo berisi akun-akun yang digunakan bersama nilai saldonya yang berfungsi untuk membuktikan sisi debit dan kredit telah sesuai. Pada akhir periode diperoleh data penyesuaian untuk selanjutnya disusun ayat jurnal penyesuaian. Fungsi ayat jurnal penyesuaian adalah memutakhirkan pembukuan menjelang penyusunan laporan keuangan. Tahap yang dilakukan kemudian pembuatan neraca saldo setelah penyesuaian yang merupakan dasar utama dalam penyusunan laporan keuangan. Karena akun – akun yang terdapat didalamnya telah mencakup semua data yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan.

Tahap selanjutnya yaitu pelaporan atau pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap meliputi laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas

laporan keuangan. Tahap berikutnya yaitu pencatatan dan posting jurnal penutup. Ayat jurnal penutup tersebut digunakan untuk menutup semua akun laba rugi. Tahap terakhir yaitu pembuatan neraca saldo setelah penutupan ini merupakan saldo yang dibuat setelah semua jurnal penutup dipindahkan kedalam buku besar. Pada tahap ini tidak perlu dilakukan apabila siklus akuntansi dijalankan dengan menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis komputer.

2.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuannya untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban (termasuk keuntungan dan kerugian), kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan arus kas.

Laporan keuangan suatu entitas tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan. Ketiga jenis informasi utama tersebut dilaporkan pada tiga jenis laporan yaitu: neraca (melaporkan posisi keuangan), laporan laba rugi (melaporkan kinerja), dan laporan perubahan posisi keuangan (melaporkan sumber penggunaan dan perubahan dana yang berdampak atas posisi keuangan).

Laporan keuangan yang lengkap menurut SAK ETAP meliputi:

a. Neraca

Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu – akhir periode pelaporan. Neraca minima mencakup pos-pos sebagai berikut:

1. Kas dan setara kas;
2. Piutang usaha dan piutang lainnya;
3. Persediaan;
4. Properti investasi;
5. Aset tetap;
6. Aset tidak berwujud;
7. Utang usaha dan utang lainnya;
8. Aset dan kewajiban pajak;
9. Kewajiban diestimasi;
10. Ekuitas.

Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya dalam neraca jika penyajian seperti itu relevan dalam rangka pemahaman terhadap posisi keuangan entitas. SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan.

b. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan;
2. Beban keuangan;
3. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas;
4. Beban pajak;
5. Laba atau Rugi Neto.

Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai “pos luar biasa”, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan dividen dan distribusi lain ke, pemilik ekuitas selama periode tersebut.

Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:

- 1) Laba atau rugi untuk periode;

- 2) Pendapatan atau beban yang diakui langsung dalam ekuitas;
- 3) Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai kebijakan akuntansi, estimasi dan kesalahan.
- 4) Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal:
 - a) Laba dan rugi;
 - b) Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;
 - c) Jumlah investasi, dividend dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasuri, dan dividen serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan perubahan kepemilikan dalam ekuitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.

d. Laporan Arus Kas

Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus:

- 1) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan tertentu sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan.
- 2) Mengungkapkan informais yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan; dan
- 3) Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

2.2.1 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi

Pada kesempatan ini penulis akan membahas mengenai Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan pada Koperasi. Adapun prosedur pada umumnya sebagai berikut :

1. Anggota Koperasi Pegawai
 - a. Bagi anggota yang meminjam uang atau mengangsur melalui koperasi petugas kasir (yang menerima uang) membuat bukti.
 - b. Petugas kasir koperasi membuat bukti yang nantinya akan diserahkan kepada Pihak bank apabila bekerja sama dengan bank ataupun bendahara dinas terkait untuk diisi. Karena bukti tersebut merupakan tanda bukti bahwa anggota atau juru bayar yang ditunjuk oleh instansi/perusahaan yang bersangkutan sudah melakukan transaksi Bukti-bukti yang digunakan adalah Bukti Kas Masuk dan Bukti Kas Keluar.
2. Bukti-bukti yang dibuat oleh petugas kasir yaitu bukti bagi anggota yang meminjam atau mengangsur pinjaman melalui koperasi, kemudian dicatat kedalam buku kas kasir.

3. Hasil catatan pada buku kas kasir, kemudian dicatat dalam buku harian kas.
4. Catatan yang ada dalam buku harian kas, kemudian dibuat rekapan sesuai dengan No. Perkiraan.
5. Hasil dari rekapan buku harian kas, sebelumnya dicatat dalam lembaran kertas terlebih dahulu, kegiatan tersebut dilakukan oleh petugas untuk menghindari kesalahan sebelum mencatatnya kedalam buku rekap harian kas.
6. Bagi anggota yang ada pada pembahasan No. 1 a, bukti tersebut dicatat dalam buku harian memorial itu merupakan buku catatan yang dibuat petugas kasir.
7. Catatan-catatan yang terdapat dalam buku harian memorial dibuat rekapan. Pecantatannya pun sama seperti yang ada pada No. 5, hasil rekapan tersebut tidak dicatat dalam buku rekapan harian memorial.
8. Hasil akhir dari catatan yang ada dalam buku rekapan harian kas dan harian memorial, kemudian dicatat kedalam buku besar oleh petugas kasir.
9. Akhir dari penyusunan laporan keuangan yang ada di Koperasi adalah penyusunan laporan laba rugi, laporan ekuitas, laporan neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

2.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

(SAK ETAP)

Standar akuntansi keuangan (SAK) adalah suatu kerangka dalam pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman setiap entitas dalam penyajian laporan keuangannya. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku untuk koperasi saat ini adalah SAK-ETAP. Penggunaan SAK-ETAP sendiri merupakan

runtutan atas keputusan IAI dibawah Menteri Keuangan, yang menghapus PSAK No.27 tentang Akuntansi Koperasi terhitung sejak 8 April 2011.

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

SAK ETAP bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan. SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis, mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP. Bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun.

Koperasi sendiri pada hakikatnya merupakan suatu entitas, namun masih belum memiliki akuntabilitas publik, bentuk akuntabilitas koperasi masih kepada para anggotanya. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik.

Entitas yang diizinkan untuk menggunakan SAK ETAP adalah entitas yang:

- a. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan

- b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

- a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
- b. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, Pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP.

Berikut ini perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP) dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK):

Tabel 2.2
Perbedaan SAK dengan SAK ETAP

NO.	Elemen	SAK	SAK ETAP	
1.	Penyajian Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Laporan keuangan ➤ Informasi disajikan 	<ul style="list-style-type: none"> posisi yang disajikan dalam neraca, 	<ul style="list-style-type: none"> Sama dengan PSAK, kecuali informasi yang disajikan dalam neraca, yang

		<p>laporan posisi keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembedaan aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang ➤ Asset lancar ➤ Liabilitas jangka pendek ➤ Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan (perubahan istilah di ED PSAK 1: Neraca menjadi laporan posisi keuangan, kewajiban liability menjadi liabilitas. 	<p>menghilangkan pos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aset keuangan ➤ Properti investasi yang diukur pada nilai wajar (ED PSAK 1) ➤ Aset biologik yang diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar (ED PSAK 1) ➤ Kewajiban berbunga jangka panjang ➤ Asset dan kewajiban jangka tangguhan ➤ Kepentingan nonpengendalian
--	--	---	--

2.	Laporan Laba Rugi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Laporan laba rugi konfrehensif ➤ Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi konfrehensif ➤ Laba rugi selama periode ➤ Pendapatan konfrehensif lain selama periode ➤ Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi konfrehensif atau catatan atas laporan keuangan 	Tidak sama dengan PSAK yang menggunakan istilah laporan laba rugi konfrehensif, SAK ETAP menggunakan istilah laporan laba rugi.
3.	Penyajian Perubahan Ekuitas		Sama dengan PSAK, kecuali untuk beberapa hal yang terkait pendapatan konfrehensif lain.

4.	Catatan Atas Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Catatan atas laporan keuangan ➤ Struktur ➤ Pengungkapan kebijakan akuntansi ➤ Sumber estimasi ketidakpastian ➤ Modal (ED PSAK 1) ➤ Pengungkapan lain 	Sama dengan PSAK, kecuali pengungkapan modal
5.	Laporan Arus Kas	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Arus kas aktivitas operasi: metode langsung dan tidak langsung ➤ Arus kas aktivitas investasi ➤ Arus kas aktivitas pendanaan ➤ Arus kas mata uang asing ➤ Arus kas bunga dan deviden, pajak penghasilan, transaksi non-kas. 	Sama dengan PSAK, kecuali: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Arus kas aktivitas koperasi: metode tidak langsung ➤ Arus kas mata uang asing tidak di atur.

2.4 Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia

Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kehadiran pedagang-pedagang bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Namun dengan keserakahan pedagang-pedagang Eropa untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya, maka hubungan dagang menjadi ingin menguasai mata rantai perdagangan. Akibatnya terjadi penindasan (menjajah) oleh pedagang-pedagang bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia. Dari penderitaan inilah yang menggugah pemuka-pemuka bangsa Indonesia berjuang untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, salah satunya ialah dengan mendirikan koperasi.

2.5 Peraturan Menteri Koperasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUMK/IX/2015, tentang “Pedoman Umum Akuntansi Koperasi”, maka setiap koperasi yang tidak memiliki akuntabilitas publik, dipersyaratkan laporan keuangannya mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

2.6 Pengertian Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Dengan demikian, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional (PSAK No.27, 2009).

Sedangkan menurut pasal 1 UU No.25 Tahun 1992 yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

2.6.1 Fungsi dan Peran Koperasi

Agar koperasi Indonesia dapat mengemban tujuan tersebut, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 pasal 4 menggariskan fungsi dan peran yang harus diemban koperasi dalam turut membangun perekonomian Indonesia, yaitu:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- b. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dengan adanya fungsi dan peranan tersebut, tanggungjawab untuk membangun susunan perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagian besar terletak di pundak koperasi. Koperasi

tidak dapat mengelak dari amanat konstitusi itu. Oleh karena itu, adanya kesungguhan koperasi untuk memiliki usaha yang sehat dan tangguh tidak dapat dielakkan. Hanya dengan cara tersebut koperasi dapat mengemban amanat konstitusi secara meyakinkan.

2.6.2 Karakteristik koperasi

Menurut Peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015. Karakteristik utama koperasi adalah posisi anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Berdasarkan hal tersebut, koperasi memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Koperasi dibentuk oleh anggota atas dasar kepentingan ekonomi yang sama;
- b. Koperasi didirikan, diatur, dikelola, diawasi serta dimanfaatkan oleh anggotanya;
- c. Tugas pokok koperasi adalah melayani kebutuhan ekonomi dan memenuhi aspirasi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota;
- d. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat ditempatkan pada koperasi lain dan anggotanya;
- e. Koperasi mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

- f. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan merupakan tanggungjawab pengurus.

2.6.3 Tujuan Koperasi

Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 Pasal 3 koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan tujuan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi di Indonesia menurut garis besarnya meliputi tiga hal sebagai berikut :

- a. Memajukan kesejahteraan anggotanya.
- b. Memajukan kesejahteraan masyarakat.
- c. Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

2.6.4 Prinsip-Prinsip Koperasi

Penyusunan prinsip-prinsip koperasi di Indonesia tidak terlepas dari sejarah dan perkembangan prinsip koperasi internasional. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undnag No. 25 Tahun 1992, koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Karena itu,tidak seorang pun yang boleh dipaksa oleh orang lain untuk menjadi anggota koperasi.

- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Penerapan prinsip ini dalam koperasi dilakukan dengan mengupayakan sebanyak mungkin anggota koperasi didalam pengambilan keputusan koperasi.

- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota

Koperasi tidak menggunakan istilah laba atau keuntungan untuk menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu. Selisih ini dalam koperasi disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya tertentu akan dibagikan kepada para anggota sesuai dengan perimbangan jasanya masing-masing. Jasa para anggota diukur berdasarkan jumlah kontribusi adalah jumlah transaksi anggota dnegan koperasi selama periode tertentu.

- d. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal

Pembatasan bunga atas modal merupakan cerminan bahwa selain menaruh perhatian terhadap pemberian imbalan yang wajar atas partisipasi para anggotanya, koperasi juga mendorong dan menumbuhkan rasa kesetiakawanan antarsesama anggota koperasi.

- e. Kemandirian

Agar dapat mandiri, koperasi harus mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Dan agar dapat mengakar kuat, koperasi harus dapat diterima oleh masyarakat. Dan agar dapat diterima oleh masyarakat, koperasi harus

memperjuangkan kepentingan serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

2.6.5 Jenis-Jenis Koperasi

Adapun jenis-jenis koperasi menurut Hudiyanto (2007:105) adalah sebagai berikut :

a. Koperasi konsumsi

Koperasi konsumen adalah koperasi yang didirikan oleh sekelompok orang yang menggunakan barang atau jasa. Pengertian pemakaian (konsumsi) dalam hal ini menunjukkan pada aktivitas pemanfaatan suatu jenis barang. Karena yang terkumpul dalam koperasi tersebut adalah orang yang membeli, menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa, maka koperasi konsumsi juga sering disebut koperasi konsumen.

b. Koperasi kredit

Koperasi kredit adalah koperasi yang bergerak dalam bidang usaha sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota dalam pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada anggota secara mudah, murah, dan cepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

c. Koperasi jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang bergerak dibidang penyediaan jasa tertentu kepada anggotanya maupun masyarakat umum, seperti koperasi angkutan, koperasi jasa audit, koperasi perumahan, koperasi asuransi dan lain-lain.

d. Koperasi serba usaha

Koperasi serba usaha adalah koperasi yang menyediakan berbagai kebutuhan ekonomi, baik dibidang produksi, konsumsi, perkreditan, maupun jasa.

e. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang kegiatannya untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

2.7 Penelitian Yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Eva Malina Simatupang (Tahun 2018)	Analisis Penerapan Analisis Penerapan Sak Etap Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Koperasi Pegawai Negeri Smpn 7 Pematang Siantar.	Laporan keuangan belum sesuai dengan SAK ETAP
2	Arma Yuliza dan Afrijal (Tahun 2016)	Analisis penerapan SAK-ETAP pada koperasi di Universitas Pasir Pengaraian.	Laporan keuangan belum sesuai dengan SAK ETAP
3	Vyta Vebiyanti (Tahun 2016)	Analisis penerapan SAK-ETAP pada laporan keuangan entitas koperasi (studi kasus Pada Koperasi Kelompok Tani Jaya Makmur di Banyuwangi).	Laporan keuangan belum sesuai dengan SAK ETAP
4	Singgih Widy Prasetyo (Tahun 2017)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi di Kota Bandar Lampung).	Laporan keuangan belum sesuai dengan SAK ETAP

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPRI GKR yang berkedudukan di Jalan Diponegoro Simpang Tugu Rambah Pasir Pengaraian Rokan Hulu Riau.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif dimana peneliti mengumpulkan, menganalisa serta menyesuaikan penyajian laporan keuangan KPRI GKR Pasir Pengaraian dengan PermenKopUKM No.13/Per/M.KUKM/IX/2015 yang berlaku.

Menurut Sugiyono (2018), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati (objek) dengan kondisi alamiah.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas:

- 1) Data Kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka (non numerik). Data kualitatif diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi. Data kualitatif yang dibutuhkan berupa profil koperasi dan uraian singkat mengenai siklus akuntansi di KPRI GKR Pasir Pengaraian.

- 2) Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan (numerik). Data kuantitatif berupa laporan keuangan selama 1 tahun (Neraca dan Laporan Laba Rugi) pada tahun 2020.

3.4 Sumber Data

- 1) Data Primer, yaitu data yang berasal dari objek penelitian atau responden, baik individu maupun kelompok (Grahita Chandrarin, 2018:123). Data ini biasanya dikumpulkan dengan instrumen berupa kuesioner atau materi wawancara. Data primer sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari KPRI GKR Pasir Pengaraian. Dalam penelitian ini, yang termasuk data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan pihak yang terkait di KPRI GKR Pasir Pengaraian yang menangani bagian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang berasal dari pihak atau lembaga yang telah menggunakan atau mempublikasikannya (Grahita Chandrarin, 2018:124). Oleh karena data sudah dapat dipastikan penggunaannya dan dipublikasi, maka tidak diperlukan lagi peneliti untuk menguji validitas dan realibilitasnya. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan tujuan penelitian, misalnya sejarah singkat, dasar hukum, visi dan misi, struktur organisasi KPRI GKR Pasir Pengaraian serta literatur seperti jurnal, buku, website, dan lain – lain yang berhubungan dengan penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1) Dokumentasi

Beberapa dokumen dan arsip yang relevan yang dapat dibuat dari catatan atau dokumen yang ada seperti profil perusahaan dan laporan keuangan.

2) Interview / wawancara

Metode ini dilakukan dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Pada penelitian ini informan yang diwawancarai adalah:

Nama : Bapak Paryono, S.Sos ,S.Pd
Nama Instansi : KPRI GKR Rambah Rokan Hulu
Alamat Instansi : Jl. Diponegoro No.145, Babussalam,
Rambah, Pasir Pengaraian Kabupaten
Rokan Hulu, Riau
Jabatan : Ketua KPRI GKR Rambah

Adapun jenis pertanyaan wawancaranya terbagi menjadi 2 jenis, yaitu :

➤ Pertanyaan umum, meliputi:

1. Sejarah berdirinya koperasi
2. Jumlah anggota koperasi awal berdiri dan saat ini
3. Syarat menjadi anggota
4. Mekanisme untuk anggota yang ingin meminjam
5. Cakupan wilayah yang menjadi anggota koperasi

➤ Pertanyaan khusus, meliputi:

1. Bentuk laporan keuangan yang dibuat oleh pihak koperasi
2. Pengetahuan pegawai bagian keuangan tentang SAK ETAP
3. Metode yang digunakan dalam mengukur penyusutan

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2012: 248). Miles dan Huberman dalam Moleong (2012: 367) menyatakan bahwa terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.

2) Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan lain-lain. Penyajian data yang paling sering dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3) Penarikan Kesimpulan Atau Verifikasi

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan itu mula-mula belum jelas dan masih bersifat sementara, kemudian meningkat sampai pada tahap kesimpulan yang tepat, yaitu pernyataan yang telah memiliki landasan yang kuat karena telah melalui proses analisis data.